

PERAN MEDIA DIGITAL MENGADVOKASI MASYARAKAT DALAM KONFLIK TAMBANG DI KABUPATEN BANTAENG

Lisana Sidqin Aliyan, Muhammad Anshar

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: shidqinaliyan8@gmail.com, anshar.akil@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran media digital dalam mengatasi konflik masyarakat pada tambang di Kabupaten Bantaeng. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan landasan **ilmu komunikasi**, khususnya pada dimensi komunikasi partisipatif dan komunikasi konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media digital memainkan peran signifikan dalam memperkuat suara masyarakat. Platform daring seperti media sosial dan petisi online menjadi sarana utama dalam menyampaikan aspirasi, mendokumentasikan pelanggaran, serta membangun solidaritas publik. Masyarakat kini dapat menyusun narasi tandingan terhadap klaim perusahaan atau pemerintah, dan secara aktif mengadvokasi perubahan melalui jaringan virtual yang luas.

Kata Kunci: konflik sosial; komunikasi; media digital.

Abstract

This study examines the role of digital media in resolving community conflicts that occur in mining in Bantaeng. This research uses a qualitative approach based on communication science, especially in the dimensions of participatory communication and conflict communication.. The results of the study show that digital media plays a significant role in strengthening the voice of the community. Online platforms such as social media and online petitions are the main means of conveying aspirations, documenting violations, and building public solidarity. The community can now create counter-narratives to company or government claims, and actively advocate for change through a wide virtual network.

Keywords: communication; digital media; social conflict.

1. PENDAHULUAN

Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) adalah sebuah kawasan industri milik Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Dibangun di atas lahan seluas 1.000 Ha yang berlokasi di Kecamatan Pajjukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan publik akibat munculnya konflik sosial yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Kehadiran tambang, khususnya tambang nikel, telah memicu polemik di tengah masyarakat. Di satu sisi, pertambangan dipandang sebagai peluang pembangunan ekonomi daerah, tetapi di sisi lain, menimbulkan berbagai persoalan seperti pencemaran lingkungan, penggusuran lahan, serta ketidakjelasan partisipasi masyarakat dalam proses perizinan dan pengelolaan sumber daya alam

Kondisi ini menciptakan ketegangan antara masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan perusahaan tambang. Ketegangan tersebut muncul akibat dampak buruh yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar perusahaan. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh tim Lembaga Bantuan Hukum Makassar, keberadaan smelter di KIBA memiliki beberapa dampak pada masyarakat sekitar,

seperti asap pembakaran yang beterbangan hingga pencemaran air. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) pernah melakukan pengawasan terhadap PT. Huadi Nickel Alloy yang akhirnya mengeluarkan sanksi administrasi paksaan kepada perusahaan tersebut. Sanksi tersebut tertuang dalam SK 5897/MENLHK/GKM.O/07/2022 tentang penerapan Sanksi Administrasi Nickel Alloy Indonesia. Saksi tersebut terkait pelanggaran pencemaran air, pencemaran udara, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, pengelolaan limbah non B3.

Konflik tersebut diperparah oleh minimnya saluran komunikasi yang transparan dan adil antara pihak-pihak yang terlibat. Masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka. Akibatnya, protes warga kerap terjadi dalam bentuk demonstrasi, blokade jalan, hingga aksi langsung ke lokasi tambang. Namun, respons pemerintah dan perusahaan sering kali tidak mampu meredam gejolak sosial tersebut karena pendekatan yang bersifat top-down dan tidak komunikatif. Ketimpangan informasi menjadi salah satu akar dari konflik yang terjadi.

Dalam konteks ini, media digital hadir sebagai salah satu sarana alternatif yang digunakan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan keluhan mereka. Platform seperti media sosial, portal berita lokal, hingga kanal video seperti YouTube digunakan untuk mendokumentasikan kerusakan lingkungan, menyebarkan informasi, serta menggalang dukungan publik secara luas. Media digital memungkinkan masyarakat yang sebelumnya termarginalkan dalam ruang diskusi formal, kini memiliki panggung sendiri untuk bersuara dan membangun opini publik. Hal ini menunjukkan pergeseran dinamika komunikasi dalam konflik sosial dari media arus utama ke media digital partisipatif.

Fenomena ini menunjukkan pentingnya pendekatan komunikasi dalam memahami dan menyelesaikan konflik sosial akibat tambang. Dengan memanfaatkan media digital, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga aktor aktif dalam menyampaikan pendapat dan memperjuangkan hak-haknya. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang lebih dalam tentang bagaimana media digital dimanfaatkan dalam konteks konflik sosial seperti yang terjadi di Kabupaten Bantaeng.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya menggali peran media digital sebagai instrumen komunikasi strategis dalam mengatasi konflik pertambangan di Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini tidak hanya melihat media sebagai alat penyebaran informasi, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial yang memungkinkan partisipasi, advokasi, dan transformasi konflik secara damai. Dengan menggunakan pendekatan ilmu komunikasi dan metode penelitian pustaka, artikel ini bertujuan memberikan pemahaman konseptual sekaligus kontribusi praktis dalam menyusun strategi komunikasi konflik berbasis komunitas.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan landasan **ilmu komunikasi**, khususnya pada dimensi komunikasi partisipatif dan komunikasi konflik. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami makna, konteks, dan dinamika sosial yang terjadi dalam konflik masyarakat terhadap tambang di Kabupaten Bantaeng. Fokusnya bukan pada angka, melainkan pada interpretasi terhadap data yang bersifat naratif, seperti artikel, berita, dokumen publik, dan unggahan media sosial.

Jenis penelitian yang digunakan adalah **penelitian pustaka (library research)**. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan mengandalkan sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel ilmiah, laporan organisasi, berita daring, serta dokumen pemerintah dan lembaga non-pemerintah yang relevan dengan isu konflik tambang dan peran media

digital. Penelitian pustaka memberikan ruang untuk merumuskan pemikiran kritis berdasarkan literatur yang sudah ada.

Pengumpulan data dilakukan melalui **studi dokumentasi**, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber tertulis baik primer maupun sekunder. Sumber primer dapat berupa artikel jurnal, buku teori, dan pernyataan resmi dari instansi terkait. Sementara itu, sumber sekunder mencakup berita daring, unggahan media sosial yang viral, serta laporan lembaga swadaya masyarakat yang menyoroti konflik tambang di Bantaeng. Data dikumpulkan berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian dan diverifikasi dari berbagai sumber untuk menjaga validitas.

Analisis data dilakukan secara **kualitatif-deskriptif** dengan teknik **analisis isi (content analysis)**. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, narasi, dan makna dari setiap dokumen atau teks yang dianalisis. Peneliti memetakan hubungan antara konflik yang terjadi dengan penggunaan media digital sebagai saluran advokasi dan penyelesaian konflik. Pendekatan ini memungkinkan untuk melihat bagaimana media digital digunakan secara strategis oleh masyarakat untuk menyuarakan aspirasi, mengorganisir aksi, dan menciptakan tekanan publik terhadap pihak yang berwenang.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konflik Masyarakat dan Perusahaan Tambang Di Kabupaten Bantaeng

Berdasarkan teori yang telah dibahas sebelumnya, teori Lewis A. Coser, konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan tambang di Kabupaten Bantaeng merupakan bentuk dari ketegangan sosial yang muncul akibat ketimpangan relasi kekuasaan, akses terhadap informasi, serta perbedaan kepentingan antara aktor lokal dan korporasi. Salah satu konflik utama adalah konflik lingkungan, yang mencakup pencemaran air, degradasi lahan pertanian, dan rusaknya ekosistem laut di wilayah pesisir. Masyarakat pesisir dan petani lokal mengeluhkan hilangnya sumber penghidupan akibat aktivitas tambang nikel, terutama setelah pembukaan lahan dan pembangunan fasilitas smelter yang berdampak pada kualitas tanah dan air.

Salah satu konflik lingkungan yang terjadi akibat aktivitas PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia adalah pencemaran udara. Berdasarkan data profil Kesehatan di Puskesmas Baruga yang terdekat dengan Kawasan Industri, menyebutkan bahwa selama tahun 2016 jumlah warga penderita gangguan saluran pernapasan (ISPA) mencapai 59 kasus, meningkat sebanyak 560 kasus di tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebanyak 1.245 kasus. Pencemaran udara tersebut berseumber dari debu hasil proses pengangkutan ore nikel dari kapal ke wilayah perusahaan, pembakaran di tungku smelter yang mengandung senyawa kimia berbahaya seperti SO₂, H₂S, Zn, dan Ni.

Aktivitas perusahaan di wilayah pesisir laut juga menjadi faktor terjadinya konflik sosial di Bantaeng. Wilayah perairan di Pesisir Kecamatan Pa'jukukang banyak dimanfaatkan sebagai budidaya rumput laut. Terdapat sebanyak 256 lokais budidaya yang dikelola oleh 160 warga. Aktivitas kapal-kapal pengangkut bahan baku nikel dan batu bara di perusahaan seingkali menabrak lokasi budidaya rumput laut warga. Selain itu, tumpahan material yang diangkut oleh kapal tongkang, seringkali jatuh dan mencemari laut. Salah satu petani rumput laut yang berada di sekitar perusahaan mengatakan bahwa sebelumnya setiap bentangan tali menghasilkan sekitar 7 kg tanaman rumput laut, namun kini hanya sekitar 4 sampai 5 kg. Ukuran rumput laut yang dihasilkan juga cenderung lebih kecil dan kotor berlumpur.

Selain itu, terjadi pula konflik sosial yang muncul dari proses pengambilan keputusan yang tidak melibatkan masyarakat secara memadai. Sejumlah warga mengalami tekanan ketika menolak pembebasan lahan, bahkan beberapa di antaranya mengalami kriminalisasi karena melakukan protes. Misalnya, sejumlah warga melakukan aksi penolakan terhadap rencana tambang dan mengkritik

proses perizinan yang dianggap tidak transparan. Hal ini memperlihatkan adanya ketimpangan dalam distribusi suara dan partisipasi warga dalam kebijakan publik.

Di sisi lain, konflik komunikasi juga menjadi elemen penting. Kurangnya sosialisasi dari pihak perusahaan dan pemerintah menyebabkan warga tidak memahami dampak jangka panjang dari proyek tambang. Informasi cenderung bersifat satu arah dan lebih menonjolkan aspek ekonomi daripada lingkungan dan sosial. Hal ini memperparah ketidakpercayaan antara masyarakat dan pihak berwenang.

Menurut teori konflik sosial dari Lewis Coser, konflik seperti ini merupakan ekspresi dari ketegangan struktural yang belum diselesaikan secara adil, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi dorongan bagi perubahan sosial yang lebih demokratis

2. Peran Media Digital dalam Mengatasi Konflik

Media digital telah menjadi instrumen penting dalam mengubah pola komunikasi konflik antara masyarakat dan perusahaan tambang, khususnya di Kabupaten Bantaeng. Berbeda dengan media konvensional yang sering kali berpihak kepada kekuasaan atau tidak memberi ruang pada suara masyarakat akar rumput, media digital menyediakan wadah yang lebih demokratis, partisipatif, dan cepat dalam menyebarkan informasi serta membangun solidaritas sosial.

Salah satu peran utama media digital adalah sebagai alat dokumentasi dan diseminasi informasi. Masyarakat terdampak tambang menggunakan media sosial seperti Facebook, YouTube, dan TikTok untuk mengunggah video dampak lingkungan, testimoni warga, serta kronologi aksi protes. Video dan foto yang menunjukkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air dan udara, serta testimoni warga yang terdampak, diunggah dan dibagikan secara luas. Dokumentasi ini tidak hanya menjadi bukti visual atas kerusakan yang terjadi, tetapi juga menjadi alat untuk menarik perhatian publik dan media arus utama.

Konten-konten yang diserukan atau diposting oleh masyarakat sering kali viral dan mendapat perhatian dari publik nasional, bahkan memicu peliputan oleh media arus utama. Aktivitas ini dikenal sebagai jurnalisme warga (*citizen journalism*), di mana masyarakat menjadi produsen informasi, bukan hanya konsumen pasif. Jurnalisme warga merupakan konsep yang menggambarkan aktivitas pengumpulan, pelaporan, analisis, dan penyebaran informasi yang dilakukan oleh individu yang bukan seorang jurnalis. Dengan menggunakan dokumentasi digital, isu-isu lokal dapat menembus batas geografis dan menjangkau audiens yang lebih luas.

Contohnya, kasus kematian Daeng Nuru, seorang pemulung berusia 78 tahun yang meninggal akibat kekerasan oleh petugas keamanan perusahaan tambang, menjadi viral setelah didokumentasikan dan dibagikan melalui media sosial. Kejadian ini memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk Lembaga Bantuan Hukum Makassar, yang kemudian mendampingi keluarga korban dalam proses hukum.

Selain itu, media digital juga berfungsi sebagai alat untuk aktivisme digital (*digital activism*). Warga dan aktivis menggunakan media sosial untuk menggalang dukungan publik, menandai akun pejabat, dan mengkritik kebijakan melalui ruang-ruang daring. Petisi daring melalui platform seperti Change.org kerap digunakan untuk mengkonsolidasikan penolakan secara formal dan mudah diakses. Strategi ini tidak hanya meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu lokal, tetapi juga memberikan tekanan kepada pemerintah dan perusahaan untuk menanggapi tuntutan masyarakat. Dalam beberapa kasus, kampanye ini berhasil menarik perhatian media nasional dan internasional, yang selanjutnya memperkuat posisi tawar masyarakat dalam negosiasi dengan pihak berwenang.

Media digital juga memungkinkan terbentuknya jejaring solidaritas antarwilayah. Isu lokal yang diangkat ke media sosial sering kali mengundang simpati dan dukungan dari aktivis lingkungan, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi dari luar daerah. Hal ini memperkuat posisi tawar masyarakat lokal karena mereka tidak lagi bergerak sendiri, melainkan dalam satu ekosistem advokasi

digital. Di sinilah media digital berperan sebagai pemersatu perjuangan lintas komunitas dan lintas isu.

Melalui platform daring, masyarakat dapat berbagi pengalaman, strategi, dan sumber daya dengan kelompok-kelompok lain yang juga berjuang melawan dampak negatif dari aktivitas pertambangan. Kolaborasi ini memperkuat gerakan sosial dan memungkinkan pertukaran pengetahuan yang bermanfaat dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat.

Selain itu, media digital memfasilitasi kolaborasi antara masyarakat, organisasi non-pemerintah (LSM), dan akademisi. Misalnya, LSM seperti WALHI dan LBH Makassar menggunakan media digital untuk menyebarkan informasi, mengorganisir pelatihan, dan mendukung masyarakat dalam proses hukum. Kolaborasi ini memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan.

Dalam kerangka teori komunikasi, media digital menciptakan ruang partisipatif di mana warga tidak hanya menerima kebijakan, tetapi dapat terlibat dalam produksi wacana dan opini publik. Pendekatan komunikasi partisipatif melihat media bukan hanya sebagai alat penyampai pesan, tetapi sebagai arena dialog, resistensi, dan negosiasi makna. Media digital memungkinkan warga Bantaeng membangun narasi tandingan terhadap klaim-klaim perusahaan atau pemerintah yang menyebut tambang sebagai proyek pembangunan.

Penerapan teori konflik sosial dalam konteks ini juga menunjukkan bahwa media digital menjadi saluran penting untuk menantang ketimpangan struktural. Masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan secara ekonomi dan politik kini memiliki sarana untuk menyuarakan ketidakadilan yang mereka alami. Dari perspektif teori komunikasi, media digital berfungsi sebagai alat transformasi sosial yang memungkinkan masyarakat untuk mengorganisir diri, membangun solidaritas, dan memperjuangkan keadilan. Menurut Manuel Castells, dalam masyarakat jaringan, kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh kontrol atas sumber daya ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan untuk mengendalikan informasi dan komunikasi. Dalam konteks ini, media digital memberikan masyarakat alat untuk menantang kekuasaan yang ada dan memperjuangkan perubahan sosial.

Selain itu, teori komunikasi partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses komunikasi. Media digital memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam produksi dan distribusi informasi, yang memperkuat kapasitas mereka untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini menunjukkan bahwa media digital bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga alat pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, media digital tidak hanya membantu merespons konflik, tetapi juga berkontribusi dalam proses perubahan sosial yang lebih inklusif dan transparan. Penggunaan media digital oleh masyarakat Bantaeng memperlihatkan bahwa kekuatan komunikasi berbasis komunitas mampu mengganggu dominasi narasi dari korporasi dan pemerintah, serta membuka ruang baru untuk advokasi berbasis keadilan sosial.

Meskipun media digital menawarkan banyak peluang, ada juga tantangan dan keterbatasan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan digital, di mana tidak semua anggota masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Ini dapat membatasi partisipasi dan memperkuat ketimpangan yang sudah ada. Selain itu, kemampuan untuk mengakses, mengolah dan menganalisis informasi harus dimiliki agar mampu memaksimalkan manfaat sosial. Informasi yang tersebar di media digital juga mengharuskan masyarakat untuk memiliki kemampuan tersebut agar tidak tergiring opini-opini yang tidak benar atau hoaks.

Selain itu, informasi yang disebarkan melalui media digital dapat dengan mudah disalahgunakan atau disalahartikan. Penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan dapat

merusak kredibilitas gerakan sosial dan menghambat upaya advokasi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa informasi yang disebarkan melalui media digital akurat dan dapat dipercaya.

Media digital memainkan peran penting dalam merespons dan mengatasi konflik antara masyarakat dan perusahaan tambang di Kabupaten Bantaeng. Dengan menyediakan platform untuk dokumentasi, aktivisme, kolaborasi, dan partisipasi, media digital memperkuat kapasitas masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan mendorong perubahan sosial. Namun, untuk memaksimalkan potensi media digital, penting untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses yang setara terhadap teknologi dan informasi.

Kekuatan media sosial dapat memperkuat kekuatan masyarakat sehingga dapat lebih diperhatikan oleh pihak perusahaan. Dengan adanya paksaan secara daring melalui media sosial, pihak tambang akan terdorong untuk melaksanakan mediasi dengan masyarakat secara langsung dengan masyarakat yang akan mempertemukan pendapat, merumuskan kesepakatan hingga akhirnya menciptakan perdamaian.

4. KESIMPULAN

Konflik yang terjadi antara masyarakat Kabupaten Bantaeng dan perusahaan tambang berakar pada ketimpangan informasi, pelanggaran hak atas lingkungan hidup, dan minimnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait investasi tambang. Bentuk konflik yang muncul tidak hanya berupa penolakan terbuka melalui demonstrasi, tetapi juga tindakan represif dari aparat, kriminalisasi warga, hingga konflik horizontal antarwarga. Situasi ini mencerminkan adanya ketegangan struktural yang mengakar, sebagaimana dijelaskan dalam teori konflik sosial, di mana ketidakadilan distribusi kekuasaan dan sumber daya melahirkan resistensi dari kelompok yang merasa dirugikan.

Dalam konteks ini, media digital memainkan peran signifikan dalam memperkuat suara masyarakat. Platform daring seperti media sosial dan petisi online menjadi sarana utama dalam menyampaikan aspirasi, mendokumentasikan pelanggaran, serta membangun solidaritas publik. Masyarakat kini dapat menyusun narasi tandingan terhadap klaim perusahaan atau pemerintah, dan secara aktif mengadvokasi perubahan melalui jaringan virtual yang luas. Dengan demikian, media digital tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga instrumen pemberdayaan masyarakat dalam merespons konflik sosial yang kompleks dan dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Wisnu Rayhan, dkk “Implemetasi Digital Marketing Menggunakan Platform E-Commerce dan Media Sosial Terhadap Masyarakat dalam Melakukan Pembelian”, *TIN* 5, No. 1 (2024).
- Aggara, Satya, “Masyarakat Jejaring, Media Sosial, dan Transforasi Ruang Publik: Refleksi Mengenai Fenomena Arab Spring dan Teman Ahok”, *Paradigma* 9, no. 3 (2019).
- Apriliyanti, Rizki dkk, “Fenomena Jurnalisme Warga sebagai *Homeless Media* dalam Produksi Berita Lokal”, *Kaganga Komunika* 6, no. 2 (2024).
- “Daya Rusak Industri Pengolahan Nikel di Bantaeng”, Balang Institute dan JATAM (2023), Hal. 35
<https://jatam.org/wp-content/uploads/2023/07/Laporan-Daya-Rusak-Industri-Pengolahan-Nikel-Bantaeng.pdf>
- Dodi, Limas, “Sentiment Ideology: Membaca Pemikiran Lewis A. Coser dalam Teori Fungsional Tentang Konflik”, *Jurnal al-‘Adi* 10, no. 1 (2017), hal 107.
- Fadillah, Nadhifa Ahdi, “Memahami Teori Sosial Karl Marx: Kelas, Konflik, dan Perubahan”, *Nusantara* 1, no. 2 (2023). Hal. 1-25.
<https://www.mongabay.co.id/2023/08/25/riset-smelter-nikel-di-bantaeng-punya-dampak-buruk-untuk-lingkungan-dan-warga-sekitar/>

- <https://lbhmakassar.org/press-release/ekspansi-industri-ekstraktif-nikel-perampasan-ruang-hidup-di-sulawesi-selatan/>
<https://www.mongabay.co.id/2023/12/31/kutukan-nikel-daeng-nuru-dan-kampung-pajjukukang/>
<https://sindomakassar.com/read/sulsel/14421/tidak-semua-tuntutan-dipenuhi-warga-papan-loe-ancam-gelar-aksi-susulan-1735107160>
- Jatnika, Dyana Chusnulitta, dkk “Teknologi Digital dalam Upaya Mediasi Konflik Sosial: Kajian Literatur Naratif” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 7, no. 1 (2019).
- Kustiawan, Winda dkk, “Konsep Komunikasi Partisipatif dalam Komunikasi Pembangunan”, *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2023), hal. 4083.
- Mahruf, Ririn, “Peran Media Digital dalam Meningkatkan Komunikasi dan Partisipasi Politik Masyarakat”, *Youth Communcation Day* 01, no. 01 (2022).
- Raya, Diva, dkk, “Sumber Kekuasaan dalam Negara: Analisis Berdasarkan Teori Konflik Karl Marx”, *Public Sphare* 3, no. 2 (2024), hal. 33-39.
- Sirajuddin, “Akar-Akar Konflik Fundamental Perspektif Ekonomi Politik”, *Iqtisaduna* 1, no. 2 (2015).
- Setiawan, Rudi “Peran Media Sosial sebagai Ruang Publik: Tinjauan Filosofis Gagasan Ruang Publik Jurgen Habermas”, *melintas* 39, no. 3 (2023).
- Siaran Pers: Laporan Catatan Akhir Tahun 2022”, LBH Makassar, hal. 18. Website <https://dev.lbhmakassar.org/wp-content/uploads/2022/12/Catatan-Akhir-Tahun-LBH-Makassar-2022.docx.pdf>
- Siregar, Waliyul Maulana “Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Kesadaran Identitas Nasional di Era Digital”, *Madani* 2, no. 10 (2024).
- Zubaidi, Ahmad dkk, “Peran Media Digital dalam Meningkatkan Partisipasi Politik: Studi Pada Tirto.id di Yogyakarta”, *Jurnal Kawistara* 10, no. 1 (2020).